

Optimalisasi Peran Sumber Daya Manusia Kelurahan dalam Mendukung Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

¹⁾Harjoyo, ²⁾Sugiyarto, ³⁾Waluyo, ⁴⁾Ferdauzi Dianti

^{1,2,3}Dosen Prodi Administrasi Perkantoran D-3 Universitas Pamulang

⁴⁾Mahasiswa Prodi Administrasi Perkantoran D-3 Universitas Pamulang

E-mail: dosen00808@unpam.ac.id; Sugiyarto_01722@unpam.ac.id; dosen00060@unpam.ac.id

Abstrak

Optimalisasi peran sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat. SDM kelurahan, yang terdiri atas aparatur pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat, berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kelurahan agar mampu mengelola dan melaksanakan program pembangunan secara partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan yang menitikberatkan pada pengembangan keterampilan manajerial, komunikasi efektif, pemanfaatan teknologi informasi, serta teknik pemberdayaan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan SDM kelurahan dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, mengelola program pembangunan, serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, optimalisasi peran SDM kelurahan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Kata kunci: Sumber daya manusia, kelurahan, pembangunan berbasis masyarakat

Abstract

Optimizing the role of human resources (HR) at the village level is a crucial factor in supporting the success of community-based development programs. Village HR, consisting of village government officials and community leaders, acts as a liaison between government policies and the aspirations of local communities. This community service activity aims to increase the capacity of village HR to enable them to manage and implement development programs in a participatory, effective, and sustainable manner. The implementation method is through training and mentoring, emphasizing the development of managerial skills, effective communication, the use of information technology, and community empowerment techniques. The results of the activity indicate an increase in the understanding and ability of village HR in facilitating active community participation, managing development programs, and identifying problems and solutions that meet local needs. Therefore, optimizing the role of village HR is expected to strengthen.

Keywords: Human resources, village, community-based development

PENDAHULUAN

Banyak kelurahan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan peran sumber daya manusia (SDM) mereka. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sekitar 60% kelurahan di Indonesia melaporkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk mencapai

keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Banyak warga kelurahan yang merasa terasing dari program-program yang seharusnya mereka ikuti, sehingga mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi.

Dalam sebuah studi kasus di sebuah kelurahan, ditemukan bahwa warga tidak mengetahui adanya program pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah setempat. Ketidapahaman ini sering kali berakar dari kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada warga. Selain itu, minimnya kapasitas SDM di tingkat kelurahan juga menjadi penghalang signifikan. Banyak aparatur kelurahan yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk melibatkan masyarakat secara efektif. Menurut Hernany et al. (2025), sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur kelurahan merupakan langkah awal yang krusial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga membangun kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal yang baik antara aparatur dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, data dari Larisu dan Jopang (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkat hingga 40% setelah adanya program pelatihan yang efektif. Contoh konkret dapat dilihat setelah diadakan pelatihan untuk aparatur kelurahan, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah warga yang berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan SDM dapat memberikan dampak positif yang nyata terhadap keterlibatan masyarakat.

Di sisi lain, perlu juga diingat bahwa pelatihan saja tidak cukup; harus ada upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Misalnya, pemerintah kelurahan dapat mengadakan forum rutin untuk mendiskusikan perkembangan program pembangunan dan mendengarkan masukan dari masyarakat.

Selanjutnya, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait tidak dapat diabaikan. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga sangat penting. LSM dapat bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyampaikan informasi dan mendukung partisipasi aktif dari warga. Sebagai contoh, di sebuah kelurahan, LSM berhasil mengorganisir pelatihan dan lokakarya yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih paham dan aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga

evaluasi.

Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran SDM di kelurahan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur kelurahan melalui pelatihan yang efektif, peningkatan komunikasi dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk LSM. Semua upaya ini harus diarahkan untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pembangunan. Tantangan yang dihadapi oleh kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan adalah isu yang kompleks dan multidimensional. Dengan memahami akar permasalahan dan menerapkan solusi yang tepat, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberhasilan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut (Masram dan Mu'ah, 2017).

Menurut Masram dan Mu'ah (2017:2), sumber daya manusia adalah proses menangani berbagai macam masalah pada ruang lingkup pekerja agar dapat melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, seorang manajer harus memastikan bahwa perusahaan memiliki pekerja yang berkualitas pada posisi yang tepat untuk mempertahankan reputasi perusahaan secara menyeluruh secara efektif dan efisien. Pengertian sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian SDM secara mikro meliputi orang-orang yang bekerja pada dan menjadi anggota suatu perusahaan atau lembaga, dan biasa disebut dengan pegawai, pekerja, juru tulis, pekerja tidak terampil, dan lain-lain. Sedangkan definisi makro human capital adalah jumlah penduduk suatu negara yang memasuki pasar tenaga kerja, baik yang menganggur maupun sudah bekerja. Oleh karena itu, pengertian sumber daya manusia secara luas mencakup mereka yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi dan mereka yang keterampilannya perlu dilatih dan dikembangkan, baik dalam organisasi maupun bisnis (Kasman, 2021).

Pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat ini, keberhasilan suatu bangsa atau organisasi tidak lagi semata-mata diukur dari kekayaan alam atau modal finansialnya. Justru, salah satu penentu utama kemajuan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas menjadi fondasi krusial yang menentukan inovasi, produktivitas, dan daya saing. Menurut Rahardjo (2012), kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kematangan, sikap, dan kualitas pendidikan. Sementara Ndraha (seperti dikutip dalam Yoman, 2016) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia melibatkan kemampuan untuk menciptakan nilai yang bukan hanya komparatif tetapi juga kompetitif, generatif, dan inovatif dengan memanfaatkan energi seperti intuisi dan kreativitas, bukan hanya sumber daya fisik seperti bahan mentah, lahan, air, dan tenaga fisik.

Kualitas sumber daya manusia meliputi kemampuan fisik dan intelektual, yang memfasilitasi kemajuan dan efisiensi kerja. Menurut Nur (2020: 366), kualitas sumber daya manusia didefinisikan sebagai kapasitas pekerja untuk memenuhi tugas di tempat kerja, berbekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2011:53), kualitas SDM dapat diukur melalui kemampuan fisik (kesehatan), kemampuan nonfisik (kecerdasan), dan kemampuan psikologis (mental). Kemampuan intelektual merujuk pada kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Kecerdasan sangat dihargai dalam masyarakat dan sering kali menjadi indikator kepemimpinan. Berikut adalah indikator untuk menilai kemampuan intelektual: [1] Memiliki pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi; [2] Menguasai bahasa, termasuk bahasa nasional, bahasa daerah, serta minimal satu bahasa asing; [3] Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industrialisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 (PP 17/2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 (Permendagri 130/2018), Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang menjadi bagian wilayah dari kecamatan. Disebutkan lebih lanjut, Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah di wilayah Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, lurah dibantu oleh perangkat kelurahan. Menurut pendapat lain, kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif dalam konteks otonomi daerah di Indonesia yang berada di bawah kecamatan (Robial, 2015).

Terdapat pendapat serupa yang mengemukakan bahwa kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan (S. Rindengan, 2016). Berdasarkan

sumber lainnya, kelurahan merupakan satuan administrasi pemerintahan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota (Jeddawi, dkk., 2018). Sementara itu, Marini (2016) menyatakan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja lurah selaku perangkat daerah kabupaten/kota yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Lebih lanjut lagi, terdapat pendapat yang menjabarkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah selaku perangkat daerah kabupaten atau kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Biswan & Agfi, 2019).

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Jadi, kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Kelurahan dan kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 25 ayat (1) bahwa “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah”.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 30 ayat (1) menjelaskan tentang Pendanaan Kelurahan bahwa: “Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan”. Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Syarat-syarat pembentukan kelurahan, sebagai berikut: [1] Faktor penduduk, sekurang-kurangnya 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga, dan sebanyak-banyaknya 2.000 jiwa atau 4.000 kepala keluarga; [2] Faktor luas wilayah, harus dapat terjangkau secara efektif dalam melaksanakan pemberian pelayanan kepada Masyarakat; [3] Faktor letak, berkaitan dengan aspek komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan harus sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemberian pelayanan Masyarakat; [4] Faktor prasarana, berkaitan dengan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan fisik pemerintah akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya; [5] Faktor sosial budaya, agama dan adat akan dapat berkembang dengan baik; [6] Faktor kehidupan masyarakat; baik mata pencarian dan ciri-ciri kehidupan lainnya akan dapat meningkat menjadi lebih baik.

Adapun penyelenggara pemerintahan kelurahan dilaksanakan oleh lurah dan perangkat kelurahan. Selain itu, dalam kelurahan juga dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan sebagai

pembantu lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2007 Pasal 11, Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut: [1] Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan; [2] Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional; [3] Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada lurah; [4] Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh walikota atas usul camat; [5] Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses perencanaan sosial yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek dalam upaya mencapai perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, birokrat perencana pembangunan memiliki peran yang sangat krusial, di mana mereka tidak hanya merancang strategi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Proses ini tidak hanya sekadar berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait.

Konsep pembangunan itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu proses perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak bersifat statis; sebaliknya, ia adalah sebuah perjalanan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus. Misalnya, dalam konteks pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan raya yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya akses yang lebih baik, masyarakat dapat menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Dalam pandangan Kartono & Nurcholis (2016), pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi suatu negara. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, dalam suatu daerah yang memiliki budaya agraris yang kuat, pendekatan pembangunan yang berbasis pada pengembangan pertanian dapat menjadi lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang berfokus pada industri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada konteks lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Lebih jauh lagi, penting untuk menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan. Dalam era modern ini, dampak perubahan iklim dan

kerusakan lingkungan menjadi isu yang semakin mendesak. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap proyek yang mereka laksanakan. Contohnya, pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan tidak hanya akan mengurangi jejak karbon, tetapi juga dapat menjadi model bagi proyek pembangunan lainnya.

Analisis mendalam terhadap setiap aspek pembangunan juga sangat penting. Misalnya, dalam hal pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, program-program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci untuk segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan warga negara; kemajuan sering disebut sebagai kemajuan material. Dengan demikian, pembangunan sering kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi, bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan (Andriyani, 2013).

Pembangunan sebenarnya meliputi 2 (dua) unsur pokok, yaitu pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil keputusan, yang menjadi manusia pembangun. Menurut Kartono & Nurcholis (2016), terdapat 3 (tiga) jenis pembangunan yaitu: [1] *Economic Growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) Teori ini menekankan pada pertumbuhan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) selama periode waktu yang telah ditentukan. Pertumbuhan ekonomi secara langsung akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi fokus pada produksi, antara lain melalui: [a] Akumulasi modal meliputi investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia; [b] Meningkatkan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas; [c] Kemajuan teknologi, yaitu cara baru untuk menggantikan pekerjaan tradisional. [2] *Basic Needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan) Teori ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan cara memenuhi secara langsung semua kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat miskin, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat. [3] *People Centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia) Inti dari proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia. Contoh dari model ini adalah *empowering*/pemberdayaan. Dalam proses ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan mewujudkan potensi manusia dalam skala yang lebih besar.

Pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) merupakan pendekatan yang menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Konsep ini bertujuan untuk memberdayakan komunitas lokal agar dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi mereka sendiri, serta merancang solusi yang sesuai.

Statistik menunjukkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebuah studi oleh World Bank (2015) menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal memiliki tingkat keberhasilan 30% lebih tinggi dibandingkan dengan proyek yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan, mereka lebih mungkin untuk berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Contoh kasus yang relevan dapat dilihat dalam program pembangunan infrastruktur di desa-desa di Indonesia. Misalnya, program PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) yang diluncurkan pada tahun 2007 berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Dalam program ini, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, yang menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2018).

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi pembangunan berbasis masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya di tingkat lokal. Banyak komunitas yang masih bergantung pada bantuan eksternal dan belum memiliki keterampilan yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan proyek secara mandiri (Putnam, 2000). Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan dan dukungan teknis agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Margayaningsih (2016) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) tahun 2025 menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan

pengambilan keputusan program pembangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan dan legitimasi program tersebut. Keterlibatan ini mencakup partisipasi masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, perumusan tujuan, penentuan strategi, hingga evaluasi hasil program. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara nyata sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat, maka muncul rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan. Rasa memiliki ini mendorong masyarakat untuk menjaga, melanjutkan, dan mengembangkan hasil program bahkan setelah dukungan eksternal atau intervensi pemerintah berakhir. Dengan demikian, kelangsungan program (program sustainability) menjadi lebih terjamin.

Secara keseluruhan, pembangunan berbasis masyarakat menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan, diharapkan hasil yang dicapai akan lebih relevan dan bermanfaat bagi kehidupan mereka.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dalam bentuk ceramah. Ceramah adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada khalayak sasaran yang bermanfaat untuk membiasakan memaksimalkan pendengarannya dalam mendapatkan suatu informasi.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu: [1] Prakegiatan sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Tim pengabdian menyiapkan semua persyaratan yang harus dipenuhi seperti pengajuan permohonan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke khalayak sasaran, pengajuan permohonan kontrak kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) universitas, pengajuan permohonan Surat Tugas PKM dosen kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) universitas, pengajuan permohonan Surat Tugas PKM mahasiswa kepada Ketua Program Studi, pengajuan Proposal Kegiatan, pembuatan materi PKM, pembuatan banner dan plakat, dan persiapan perlengkapan lain seperti laptop, *projector*, dan alat penunjang lainnya; [2] Studi Pendahuluan. Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim PKM terlebih dahulu melakukan survei pendahuluan terhadap kelompok sasaran sebagai bagian dari pendekatan needs assessment. Pendekatan ini merupakan tahapan penting dalam kegiatan PKM karena bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata, permasalahan utama, serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat sasaran secara sistematis dan partisipatif. Melalui *needs assessment*, program pengabdian tidak hanya disusun berdasarkan asumsi pelaksana, tetapi berlandaskan pada

kondisi empiris dan aspirasi masyarakat (Kettner, Moroney, & Martin, 2021). Survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi awal terkait aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat yang relevan dengan tujuan kegiatan PKM. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai dasar dalam penentuan materi, metode, serta strategi pelaksanaan kegiatan pengabdian, sehingga intervensi yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran, kontekstual, dan berkelanjutan. Studi terbaru juga menegaskan bahwa penerapan needs assessment dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas program serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan (Rossi, Lipsey, & Henry, 2023).

[3] Studi Literatur. Studi literatur berupa konsep, teori dan generalisasi yang dijadikan landasan berpikir untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Tahap ini dilakukan dengan mencari, membaca, dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas baik melalui buku-buku, jurnal PKM sebelumnya yang ada kaitannya dengan PKM dan dari bahan-bahan yang mendukung lainnya seperti dari internet, berdiskusi dengan ketua program studi dan rekan-rekan dosen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PKM sehingga memberikan landasan bagi pembahasan teoritis; [4] Studi Lapangan Tim PKM menghubungi Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok untuk merumuskan format apa yang tepat untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada staf kelurahan dan perwakilan warga serta lembaga masyarakat yang akan hadir. Pada studi lapangan yang dilakukan juga disepakati waktu pelaksanaan agar tidak mengganggu kegiatan rutin baik dari pihak pengabdian maupun dari mitra; [5] Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok Jl. Ketapang No.5, RT.1/RW.2, Kelurahan Kedaung, Kec. Sawangan, Depok, Jawa Barat 16516, selama 3 (tiga) hari yaitu Selasa s.d. Kamis, 07 - 09 Oktober 2025 Waktu: Pkl. 09.00 – 12.00 WIB. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah staf kelurahan, kader PKK, pengurus Koperasi Merah Putih, dan tokoh masyarakat. Jumlah keseluruhan peserta atau mitra yang hadir adalah 27 orang.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM di Kantor Kelurahan Kedaung

Kelurahan Kedaung, yang terletak di Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, merupakan sebuah wilayah yang tengah berkembang pesat baik dari segi infrastruktur maupun kehidupan sosial masyarakatnya. Dengan lokasi strategis yang dekat dengan pusat kota Depok serta akses yang semakin mudah menuju Jakarta dan sekitarnya, Kedaung menjadi salah satu kawasan yang menarik perhatian bagi para pendatang dan investor. Kelurahan Kedaung saat ini dipimpin oleh lurah yang bernama Dion Wijaya, S.M. Secara demografis, Kelurahan Kedaung memiliki populasi yang cukup padat dengan beragam latar belakang sosial dan budaya. Masyarakat di sini dikenal ramah dan gotong royong, menjaga tradisi serta kekompakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehidupan ekonomi masyarakat didominasi oleh usaha kecil menengah, perdagangan, serta beberapa sektor jasa yang mulai tumbuh dengan dukungan fasilitas yang ada.

Adapun pelaksanaan kegiatan PKM yaitu: [1] Hari pertama (Selasa, 07 Oktober 2025), penyuluhan dan edukasi dengan materi Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Penyampaian materi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini penting karena menurut Dewi (2024: 217) salah satu strategi penting adalah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompetitif. SDM adalah aset paling berharga, unik, dan tak terduga dari sebuah perusahaan. Untuk mencapai tujuannya, sebuah organisasi membutuhkan SDM sebagai pengelola sistem, karena mereka adalah faktor sentral dalam pengelolaan organisasi. SDM berperan sebagai penggerak utama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat bergantung pada produktivitas SDM. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya,

pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut; [2] Hari kedua (Rabu, 08 Oktober 2025), penyampaian materi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Pembangunan Berbasis Masyarakat (PBM) merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dalam pendekatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program pembangunan. Materi PBM menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh partisipasi, kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Masyarakat didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi lokal, serta permasalahan yang dihadapi, kemudian bersama-sama merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Selain itu, PBM mengedepankan prinsip partisipatif, inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup secara berkelanjutan; [3] Hari ketiga (Kamis, 09 Oktober 2025) dilakukan evaluasi dengan melakukan tanya jawab dan diskusi berkaitan dengan materi maupun pelaksanaan PKM secara menyeluruh. Kegiatan ditutup dengan pemberian cendera mata dan plakat dari tim pengabdian kepada Kepala Kelurahan (Lurah) Kedaung, Bapak Dion

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan lurah, ditemukan beberapa masalah-masalah, kemudian dipecahkan bersama pada saat pelaksanaan PKM, antara lain: [1] Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM kelurahan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan. Masih ada staf kelurahan yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan program pembangunan berbasis masyarakat, sehingga peran mereka dalam menggerakkan dan memfasilitasi partisipasi warga menjadi kurang optimal. Solusi yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan dan edukasi kepada aparatur kelurahan terkait perannya di masyarakat; [2] Minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Namun, di Kelurahan Kedaung, masih ditemukan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akibat kurangnya sosialisasi yang efektif dan rasa kepemilikan terhadap program-program pembangunan yang ada. Solusi yang diberikan mendorong pemimpin (lurah) untuk lebih sering melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama baik dalam rapat

maupun kegiatan pembangunan daerah.

Adapun target luaran yang ingin dicapai dari pengabdian ini adalah meningkatnya kapasitas dan efektivitas staf kelurahan dalam mengelola program pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan PKM berjalan dengan lancar dan memperoleh sambutan positif dari khalayak sasaran. Hal ini tercermin dari tingkat kehadiran peserta yang sesuai dengan target, partisipasi aktif selama sesi pemaparan materi dan diskusi, serta antusiasme peserta dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman yang berkaitan dengan tema kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mitra dan mudah dipahami oleh peserta. Mitra menyampaikan apresiasi serta harapan agar kegiatan PKM dapat dilanjutkan pada waktu mendatang dengan tema yang berbeda. Permintaan tersebut muncul sebagai respons atas manfaat yang dirasakan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta. Mitra menilai bahwa kegiatan PKM memiliki kontribusi positif dan strategis, sehingga keberlanjutan program dengan topik lain yang sesuai kebutuhan mitra dinilai penting untuk mendukung peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian di atas, tim pengabdian memberikan saran-saran sebagai berikut: [1] Pihak kelurahan perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara perangkat kelurahan, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini akan mempermudah proses identifikasi kebutuhan masyarakat dan mempercepat penyaluran informasi terkait program Pembangunan; [2] Kelurahan disarankan memanfaatkan aplikasi administrasi, *platform* survei digital, dan media informasi kelurahan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterlibatan warga dalam proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. (2019). Pengaruh sumber daya manusia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 24–40.
- Andriani, A. D., Mulyana, A., Widarnandana, I. G. D., Armunanto, A., Sumiati, I., Susanti, L., Siwiyanti, L., Nurlaila, Q., Pangestuti, D. D., & Dewi, I. C. (2022). *Manajemen sumber daya manusia* (Vol. 1). Tohar Media.
- Andriyani, Sri dan Suyana Utama. (2013). Analisis pusat pertumbuhan di Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4 (4), 220-229.
- Arthika Dewi, M., Purwohedi, U., & Ulupu, I. (2024). The Influence of human resources,

- information technology, and internal control systems on budget preparation with external factors as moderating variables. *Journal of World Science*, 3(7), 883–896.
- Biswan, A. T., & Agfi, N. M. (2019). *Dana kelurahan: Pemetaan pada Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan*. Politeknik Keuangan Negara STAN. Retrieved 04 30, 2022.
- Hernani, R., et al. (2007). Pengenalan dan penggunaan lengkuas. merah dan putih. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*, 2(1),. 45-50.
- Jeddawi, dkk. (2018). Studi kemungkinan perubahan status Desa Teluk Kapuas menjadi kelurahan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, III. doi:<https://doi.org/10.33701/jipsk.v3i1.301>
- Jopang , Zulfiah Larisu , La Ode Mustafa R , Syamsul Alam , Ambo Upe. (2023). Pelatihan penyusunan rencana pembangunan di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. *Communnity Development Journal*, 4(4). 8921-8925.
- Kartono, D.T., dan Nurcholis, H. (2016). *Pembangunan masyarakat kota dan desa*. Edisi 3. Universitas Terbuka.
- Kasman, P. S. P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjabanksyariah indonesia: pemberdayaan sumber daya manusia, motivasi kerja dan perubahan organisasi (*literature review manajemen*). *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 689-696. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>
- Kettner, P. M., Moroney, R. M., & Martin, L. L. (2021). *Designing and managing programs: An effectiveness-based approach*. Sage Publications.
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, 9(1), 158–190. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/77/71>
- Masram dan Mu'ah. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Zifatama Publisier.
- Nasution et al. (2024). Peningkatan kualitas sdm masyarakat dalam rangka mencapai program pembangunan di Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. *ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). 178-192.
- Nur, W. S., Meigawati, D., & Sampurna, R. H. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadapkinerja organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2). 364-376.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 (PP 17/2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 (Permendagri 130/2018)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kecamatan. PP Nomor 17 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Raharjo, S. (2012). Evaluasi trend kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2). 511-532.
- Rahmadi, S., Parmadi, & Dwi Hastuti. (2025). Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur kelurahan pelabuhan dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung

- Jabung Barat. *Studium: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(3). 115-122.
- Robial, D. F. (2015). Peran pemerintah kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Ilmu Politik*. Retrieved 04 28, 2022, from [https://www.neliti.com/id/publications/1137/peranpemerintahkelurahan-dalam-mewujudkan-kepemintahan-yang-baik-studi-di-ke](https://www.neliti.com/id/publications/1137/peranpemerintahkelurahan-dalam-mewujudkan-kepemerintahan-yang-baik-studi-di-ke)
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2023). *Evaluation: A systematic approach*. Sage Publications.
- S. Rindengan, M. (2016). Kepemimpinan lurah dalam pelayanan administrasi di Kelurahan Tinoor I Kecamatan Tomohon Utara. *Jurnal Ilmu Politik*. doi:[https://www.neliti.com/id/publications/1167/kepemimpinan-lurahdalam-pelayanan-administrasi-di-kelurahan-tinoor-i-kecamatan](https://www.neliti.com/id/publications/1167/kepemimpinan-lurahdalam-pelayanan-administrasi-di-kelurahan-tinoor-i-kecamatan-jeddawi) Jeddawi, dkk., 2018
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi manajemen pegawai negeri sipil*. Rafika Aditama.
- Simamora, H. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Edisi Ke-3. STIE YKPN.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495
- World Bank. (2015). *Indonesia: Evaluation of the urban community driven development program*. World Bank.
- Yoman, M., Pratiknjo, M. H., & Tasik, F. (2016). Kualitas sumber daya aparatur dalam mencapai tujuan pembangunan di Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(3).